

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ahmadi, Rumlan. 2005. *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: IKIP Malang.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengenalan Tentang DKPP untuk Penegak Hukum*. Jakarta: Makalah disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2017. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas.
- Dahl, Robert Alan. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Hadriman, Fransisco Budi. 2016. *Franz Magnis-Suseno Sosok dan Pemikirannya*. Jakarta: Kompas.
- Hilman, Ben. 2011. "Electoral Governance and Democratic Consolidation In Indonesia." *The Indonesian Quarterly* 301-323.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- IDEA. 2002. *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilihan Umum*. Stockholm: International IDEA.
- Indrawan, Jerry. 2018. "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PPU-XI/2013 Terhadap Efektivitas Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum." *Jurnal Etika & Pemilihan Umum* 65-75.
- Keraf, Alexander Sonny. 1991. *Etika bisnis: membangun citra bisnis sebagai*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pito, Andrianus, and Toni. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung: Nuansa.
- Satori, Djam'ah. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Peraturan Undang-Undang

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. 2017. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara